

STRATEGI PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI DI KECAMATAN ANGKOLA BARAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Zainal Abidin¹, Dwi Febrimeli²

zainulabidin140202@gmail.com¹, dwimemel@gmail.com²

Politeknik Pembangunan Pertanian Medan

ABSTRAK

Zainal Abidin. Nirm. 01.01.21.268. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, serta merumuskan strategi penguatan kelembagaan untuk meningkatkan daya saing petani. Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM (2023), terdapat 1 unit KUD dan 14 unit koperasi non-KUD, namun kelembagaan petani masih lemah, ditandai dengan kurangnya struktur organisasi, manajemen usaha, dan akses pasar. Permasalahan diperparah dengan luasnya lahan tanaman salak yang hasil panennya sering tidak tersalurkan. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis SWOT mengidentifikasi kekuatan berupa komoditas unggulan lokal dan motivasi petani milenial; kelemahan berupa rendahnya manajemen kelembagaan; peluang berupa dukungan program KUR dan kemitraan; serta ancaman berupa fluktuasi harga salak dan menurunnya minat konsumen. Strategi yang dihasilkan mencakup pendampingan pemerintah, pelatihan olahan salak, penguatan gapoktan, diversifikasi produk, dan pengembangan pemasaran digital. Tingkat partisipasi petani dalam pembentukan KEP menunjukkan kehadiran tinggi (71,4%), keaktifan memberikan masukan (57,1%), keterlibatan dalam perencanaan (57,1%), dan persetujuan rencana (100%). Hasil ini menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian, akses pasar, dan kesejahteraan petani.

Kata Kunci : Angkola Barat, Kelembagaan Ekonomi Petani, Petani Milenial, Strategi Kelembagaan, SWOT.

ABSTRACT

Zainal Abidin. Nirm. 01.01.21.268. This study aims to analyze the condition of Farmer Economic Institutions (KEP) in Angkola Barat District, South Tapanuli Regency, and to formulate strategies for strengthening these institutions to enhance farmers' competitiveness. Based on data from the Department of Trade and Cooperatives for SMEs (2023), there is 1 Village Unit Cooperative (KUD) and 14 non-KUD cooperatives; however, farmer institutions remain weak, characterized by poor organizational structure, inadequate business management, and limited market access. The problem is exacerbated by extensive salak plantation areas, the yields of which are often not well distributed. This study employed a mixed-methods approach, combining qualitative descriptive and quantitative methods. SWOT analysis identified strengths such as local superior commodities and motivated millennial farmers; weaknesses in institutional management; opportunities including KUR program support and partnerships; and threats such as salak price fluctuations and declining consumer interest. The strategies developed include government facilitation, salak processing training, strengthening farmer groups (gapoktan), product diversification, and digital marketing development. Farmers' participation in forming KEP showed high attendance (71.4%), active input provision (57.1%), involvement in planning (57.1%), and full approval of plans (100%). These findings emphasize the importance of continuous capacity building to improve farmers' independence, market access, and welfare.

Keywords: Institutional Strategies, Farmer Economic Institutions, Millennial Farmers, West Angkola, SWOT.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kelembagaan ekonomi petani memiliki peran yang sangat penting sebagai tempat bagi petani untuk mengatur sumber daya ekonomi dan sosial secara bersama untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam bidang pertanian di Indonesia, kelembagaan ekonomi pertanian menjadi fokus utama dalam upaya berdayakan petani agar dapat bersaing di pasar global yang semakin kompetitif. Menurut data statistik sumber daya manusia dan kelembagaan petani (2023) menjelaskan jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) di Indonesia pada tahun 2023 adalah 12.996, jumlah ini naik dari 12.899 di tahun 2022.

Kelembagaan petani merupakan organisasi yang didirikan dan dijalankan untuk kepentingan petani, termasuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian nasional. Tujuannya untuk memperkuat kepentingan petani dan mendukung perkembangan sektor pertanian di Indonesia. Pada tingkat nasional, lembaga ini bertugas memajukan sektor pertanian melalui program, proyek intensifikasi, dan peningkatan produksi pangan. (Prasekti et.al, 2025)

Data Kelembagaan Ekonomi Petani di Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 545 KEP dari 455 Kecamatan, sedangkan data Kelembagaan Ekonomi Petani di tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebanyak 11 KEP dari 15 Kecamatan pada tahun 2023 (Data Statistik Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Petani, 2023). Keberadaan kelembagaan ekonomi pertanian dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus diatasi untuk mencapai kesuksesan yang diharapkan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah yang dapat mendorong pertumbuhan kelembagaan ini. Kelemahan dalam manajemen internal dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia di dalam kelembagaan menjadi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan program penguatan kapasitas kelembagaan pertanian yang tidak hanya fokus pada peningkatan kemampuan teknis tetapi pengembangan keterampilan, kepemimpinan dan manajerial perlu untuk ditingkatkan.

Kondisi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) di Kecamatan Angkola Barat berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Tapanuli Selatan (2023) menunjukkan jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 1 unit dan jumlah Koperasi Non KUD sebanyak 14 unit. Permasalahan yang dihadapi petani di Kecamatan Angkola Barat terletak pada tidak adanya kelembagaan ekonomi petani (KEP), yang berdampak pada terbatasnya kemampuan petani dalam bernegosiasi dan mengakses pasar. Selain itu, di wilayah ini terdapat lahan tanaman salak yang cukup luas, namun hasil panennya sering tidak tersalurkan dengan baik karena tidak adanya mekanisme penyaluran yang terintegrasi dengan pasar. Sebagian besar kelompok tani (poktan) di wilayah ini belum memiliki struktur organisasi yang kuat serta manajemen usaha yang baik, sehingga menghambat optimalisasi potensi agribisnis yang dimiliki.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi petani (KEP) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing petani di pasar. Untuk itu, diperlukan pembinaan yang berfokus pada pembentukan dan penguatan kelembagaan petani. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan teknologi pertanian modern, mengelola usaha tani lebih efisien, dan memperluas pemasaran hasil pertanian ke pasar yang lebih potensial. Melalui penguatan kelembagaan, diharapkan petani dapat menjalankan usaha tani secara lebih mandiri, memiliki akses pasar yang lebih baik, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Dengan demikian, kelembagaan ekonomi pertanian memiliki peran yang strategis dalam membangun ketahanan ekonomi petani melalui kerjasama dan kolaborasi berdasarkan temuan di atas, peneliti mengangkat judul pengkajian tentang Strategi Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

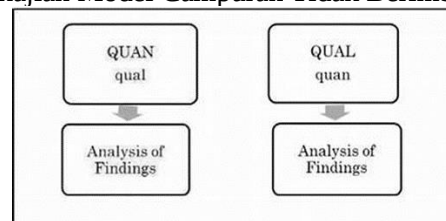
Metode yang digunakan dalam pengkajian ini menggunakan pendekatan mix methods (campuran), yang mengombinasikan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Pengkajian menggunakan mixed methods adalah langkah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan dua metode yaitu metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan untuk menjawab masalah dalam satu kegiatan pengkajian (Creswell dan Guetterman, 2019).

Tipe-tipe dalam pengkajian mixed methods dapat dikelompokkan menjadi empat kategori utama, yaitu embedded, explanatory, exploratory, dan triangulation (Cresswell, 2007: 62–79). Selanjutnya, menurut Cresswell (dalam Sugiono, 2011: 406–407), pengkajian kombinasi atau mixed methods dikelompokkan menjadi dua model utama, yaitu model sequential (berurutan) dan model concurrent (campuran). Model sequential terbagi menjadi dua jenis, yaitu sequential explanatory (pendekatan pembuktian) dan sequential exploratory (pendekatan eksplorasi). Sementara itu, model concurrent juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu concurrent triangulation (gabungan kuantitatif dan kualitatif yang seimbang) dan concurrent embedded (penguatan metode dengan metode kedua yang mendukung metode utama).

Metode pengkajian yang digunakan dalam pengkajian ini adalah metode campuran tidak berimbang (concurrent embedded design). Sugiyono (2011) mengemukakan bahwa metode campuran tidak berimbang (concurrent embedded design) adalah metode pengkajian yang mengkombinasikan penggunaan metode pengkajian kuantitatif dan kualitatif secara simultan atau bersama-sama tetapi bobot metodenya berbeda. Pada metode ini terdapat metode primer dan metode sekunder.

Metode primer digunakan untuk memperoleh data yang utama, sedangkan metode sekunder digunakan untuk memperoleh data guna mendukung data yang diperoleh dari metode primer.

Gambar 2 Pengkajian Model Campuran Tidak Berimbang (Concurrent)



Sumber: Sugiyono, 2011, hlm. 43

Berdasarkan gambar di atas terlihat ada dua model penggabungan metode, dengan penulisan huruf kapital sebagai penunjuk bahwa metode tersebut merupakan metode primer, sedangkan penulisan huruf kecil sebagai penunjuk bahwa metode tersebut merupakan metode sekunder. Pada model sebelah kiri, metode primernya (yang bobotnya lebih tinggi) adalah kuantitatif. Sedangkan pada model sebelah kanan, metode primernya adalah metode kualitatif. Dalam pengkajian ini peneliti menggunakan model campuran tidak berimbang (concurrent embedded design) dengan pendekatan kualitatif sebagai metode primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Pengkajian

Deskripsi Karakteristik Responden

Karakteristik responden adalah penjelasan tentang keberadaan yang digunakan sebagai informasi untuk mengetahui identitas sebagai responden dalam pengkajian ini. Responden adalah objek pengkajian yang memberikan interpretasi pengaruh. Responden dalam pengkajian sebanyak 37 orang yang digunakan untuk dikemukakan sebagai diri mulai dari umur dan tingkat Pendidikan. Pada Pengkajian ini ada 2 cara pengambilan data, yaitu FGD dan wawancara mendalam, pada FGD dihadiri oleh 35 responden, dan wawancara mendalam dengan 2 informan key.

A. Umur Responden

Umur adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun mati. Umur adalah usia yang dimiliki responden guna memudahkan untuk mengetahui apa yang mendasari keputusan petani.

Tabel 1. Data Umur Responden

S	Klasifikasi	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	24-29	1	2,7
2	30-35	4	10,8
3	36-41	5	13,5
4	42-47	9	24,3
5	48-53	7	19
6	54-59	9	24,3
7	60-65	2	5,4
Jumlah		37	100

Sumber : Analisis Data Primer 2025

Data menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada rentang usia 42–47 tahun dan 54–59 tahun, masing-masing sebesar 24,3% dari total 37 responden. Kelompok usia yang paling sedikit berasal dari kelompok usia 24–29 tahun, yaitu hanya 2,7%. Secara keseluruhan, data mencerminkan sebaran usia responden yang dominan pada usia paruh baya hingga menjelang pensiun. Sejalan dengan hasil di lapangan responden dalam pengkajian ini termasuk dalam kategori usia produktif. Pada usia produktif, seseorang mampu melakukan pekerjaan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menerima hal-hal baru dalam menunjang kegiatan yang dijalankan dalam berusahatani, memiliki semangat yang tinggi di dukung dengan tubuh yang sehat, kuat dan daya tangkap yang cepat.

B. Pendidikan Responden

Tabel 2 Pendidikan Responden

No	Klasifikasi	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	SD	4	10,9
2	SMP	15	40,5
3	SMA	13	35,1
4	S1	5	13,5
Jumlah		37	100

Sumber : Analisis Data Primer 2025

Berdasarkan data klasifikasi tingkat pendidikan responden, mayoritas responden dalam pengkajian ini memiliki latar belakang pendidikan menengah pertama (SMP), yaitu sebanyak 15 orang atau sebesar 40,5%. Selanjutnya, responden dengan pendidikan menengah atas (SMA) berjumlah 13 orang atau 35,1%. Sementara itu, responden yang berpendidikan sarjana (S1) tercatat sebanyak 5 orang atau 13,5%, dan responden dengan pendidikan dasar (SD) sebanyak 4 orang atau 10,9%. Dari total 37 responden, terlihat bahwa sebagian besar memiliki tingkat pendidikan menengah, yang menunjukkan bahwa

pemahaman terhadap program kelembagaan ekonomi petani cukup potensial untuk ditingkatkan melalui pendekatan edukatif dan pelatihan. Tingkat pendidikan ini juga menjadi indikator penting dalam merancang strategi penyuluhan dan pemberdayaan yang tepat sasaran.

C. Keadaan Kelembagaan di Kecamatan Angkola Barat

Kecamatan Angkola Barat yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pertanian cukup besar, terutama pada komoditas unggulan berupa salak. Komoditas ini telah lama menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat tani di kecamatan tersebut. Banyak petani di Angkola Barat menanam salak secara turun-temurun dengan sistem budidaya yang masih bersifat tradisional dan berbasis pengalaman. Luas lahan salak yang sangat banyak dan dalam musim panen produksi salak mencapai volume yang tinggi. Tetapi, potensi ini belum didukung dengan manajemen kelembagaan yang kuat, dan mampu mengelola hasil produksi secara maksimal, meningkatkan nilai tambah, serta memperluas akses pasar.

Meskipun jumlah kelompok tani cukup banyak dan hampir tersebar di seluruh desa, namun sebagian besar dari mereka masih berperan sebatas sebagai wadah administratif untuk mengakses program dan bantuan dari pemerintah. Fungsi utama kelompok tani masih bersifat pasif, dan belum berkembang sebagai organisasi ekonomi yang mandiri. Keberadaan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) pun sejauh ini belum mampu berfungsi secara optimal sebagai lembaga usaha petani, terutama dalam aspek produksi, pemasaran, pengolahan hasil, hingga akses permodalan.

Data dari BPS Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2024 menguatkan kondisi tersebut, yang mencatat bahwa hingga kini belum teridentifikasi keberadaan kelembagaan ekonomi petani formal di Kecamatan Angkola Barat, seperti koperasi tani aktif, unit usaha agribisnis petani, maupun kelembagaan keuangan mikro berbasis kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan petani masih dalam tahap sangat awal dan belum mengalami transformasi signifikan ke arah kelembagaan ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

Di sisi lain, para petani salak masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari fluktuasi harga saat panen raya, keterbatasan akses pasar yang adil, hingga kurangnya sarana pengolahan pascapanen. Tanpa adanya kelembagaan yang mampu mengelola hasil produksi secara kolektif dan efisien, petani cenderung menjual hasil panen secara individual dengan harga rendah kepada pedagang perantara (tengkulak), sehingga margin keuntungan yang diperoleh sangat kecil. Dalam jangka panjang, kondisi ini melemahkan posisi tawar petani dan menghambat peningkatan kesejahteraan mereka

Masalah lain yang turut memperlambat penguatan kelembagaan ekonomi adalah minimnya kapasitas manajerial para pengurus kelompok tani, lemahnya akses terhadap sumber permodalan, dan kurangnya pendampingan teknis dari penyuluh pertanian maupun lembaga pendukung lainnya. Hal ini membuat banyak kelompok tani hanya aktif pada saat ada bantuan, namun tidak memiliki kesinambungan program atau usaha ekonomi yang berjalan secara mandiri.

Menurut Nasution et al. (2023), penguatan kelembagaan ekonomi petani menjadi kunci dalam mewujudkan kemandirian petani, peningkatan efisiensi usaha tani, dan penguatan daya saing produk pertanian lokal di tengah tekanan pasar bebas. Tanpa kelembagaan yang kuat, petani akan terus bergantung pada mekanisme pasar yang tidak berpihak, serta tidak mampu mengakses sumber daya yang lebih besar seperti kredit usaha tani, teknologi pertanian, atau pelatihan kewirausahaan.

Meski demikian, peluang untuk memperkuat kelembagaan ekonomi petani di Angkola Barat sebenarnya cukup terbuka. Terdapat potensi kerja sama dengan pihak-

pihak strategis, seperti dukungan pemerintah daerah, kemitraan dengan sektor swasta seperti PT Martabe, serta kolaborasi dengan LSM dan perguruan tinggi. Melalui kemitraan tersebut, pembentukan kelembagaan ekonomi seperti koperasi tani, unit simpan pinjam kelompok, pengolahan hasil pascapanen, dan sistem pemasaran dapat dikembangkan secara bertahap.

Dengan membentuk Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), petani di Kecamatan Angkola Barat akan memiliki wadah resmi dan legal untuk memperkuat posisi tawar, mengelola produksi bersama, mengakses permodalan, mengembangkan usaha pascapanen, serta memasarkan produk secara efisien dan terorganisir. KEP juga dapat menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan, yang tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi, tetapi juga membangun solidaritas dan kemandirian petani.

Sehingga pembentukan KEP menjadi kebutuhan mendesak yang harus direspons secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan, agar mengoptimalkan potensi salak sebagai komoditas unggulan daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Analisis Swot Dalam Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi posisi strategis kelompok tani dalam pembentukan kelembagaan ekonomi tani di Kecamatan Angkola Barat. Data diperoleh dari hasil wawancara mendalam (depth interview) dengan pihak Dinas Pertanian, P4S, serta hasil diskusi kelompok terarah (FGD) yang melibatkan ketua-ketua kelompok tani. Analisis ini bertujuan menggali kondisi nyata di lapangan terkait potensi, kendala, serta tantangan dan peluang yang dimiliki kelompok tani, sehingga strategi pembentukan kelembagaan dapat disusun secara realistis dan tepat sasaran.

Analisis Kekuatan (Strengths) Dalam Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani

Beberapa kekuatan utama yang dimiliki oleh kelompok tani di Kecamatan Angkola Barat antara lain:

a. Komoditas unggulan lokal

Kecamatan Angkola Barat merupakan wilayah yang memiliki potensi pertanian khas dan bernilai ekonomi tinggi, yang salah satunya tercermin dari keberadaan komoditas unggulan Salak Sibakkua. Komoditas ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar petani, tetapi juga telah mengakar sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat setempat. Berdasarkan observasi lapangan, diketahui bahwa Desa Parsalakan, salah satu sentra produksi salak di Angkola Barat, pada Badan Pusat Statistik (2024) Kecamatan Angkola Barat memiliki luasan lahan salak mencapai 14.735,36 hektar dengan total produksi tahunan sekitar 319.907,00. Pada fakta lapangan banyak masyarakat petani di kecamatan ini menggantungkan mata pencaharian utama dari budidaya salak, di mana aktivitas pertanian salak tidak hanya memberikan pendapatan rutin.

Salak Sibakkua sendiri memiliki karakteristik yang sangat khas rasa manis berpadu asam segar, tekstur daging buah yang padat, serta aroma harum yang alami menjadikannya berbeda secara signifikan dari varietas salak lainnya. Keunikan ini tidak terlepas dari kondisi lokal yang mendukung, seperti struktur tanah dan iklim di wilayah perbukitan Angkola Barat. Meskipun potensi agribisnis salak sangat besar, sebagian besar petani masih tergolong belum sejahtera karena harga jual yang tidak menentu serta belum optimalnya peran pemerintah dalam mendukung kelembagaan ekonomi petani secara maksimal. (Lubis, 2024)

Oleh karena itu, pemanfaatan potensi Salak Sibakkua tidak cukup hanya mengandalkan budidaya secara konvensional, melainkan membutuhkan dukungan kelembagaan ekonomi petani yang kuat, seperti koperasi tani atau kelompok usaha

bersama yang berbasis komoditas unggulan. Dengan kelembagaan yang efektif, aspek produksi, distribusi, dan pemasaran dapat terkoordinasi lebih baik, sehingga nilai tambah produk dapat meningkat dan kesejahteraan petani dapat terangkat. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui sistem agribisnis yang terstruktur dan berbasis pada potensi lokal yang otentik.

Hal ini sejalan dengan pengkajian yang dilakukan oleh (Dzulkarnain, et.al, 2020) dalam jurnal berjudul “Strategi Pengembangan Kemitraan Agroindustri Nilam di Kabupaten Konawe Selatan Menggunakan Metode Analisis SWOT dan AHP”, yang menyatakan bahwa penguatan komoditas lokal unggulan perlu diiringi dengan strategi kelembagaan dan kemitraan yang mendukung pengembangan pasar secara berkelanjutan (Dzulkarnain et al., 2020).

"Petani di daerah ini memiliki keunggulan dalam komoditas salak, khususnya Salak Sibakkua yang merupakan varietas khas dan hanya ditemukan di wilayah ini.." Dian Rizky Batubara, Duta Petani Milenial.

"Di Kecamatan Angkola Barat, produk unggulan yang telah berkembang secara khusus adalah salak. Pada kegiatan Musrenbang sebelumnya, yang direncanakan untuk dikembangkan lebih lanjut adalah komoditas cabai merah dan bawang merah. Namun, pengembangan kedua komoditas tersebut di Kabupaten Tapanuli Selatan, khususnya di wilayah ini, masih belum berjalan secara optimal. Harapan dari Bapak Bupati adalah agar cabai merah dan bawang merah dapat mulai dikembangkan sebagai komoditas unggulan baru di samping salak yang sudah lebih dahulu dikenal." Rahayu Ningsih, Dinas Pertanian Tapsel.

" Potensi unggulan lokal di Kecamatan Angkola Barat adalah komoditas salak, karena mayoritas petani di wilayah ini telah membudidayakan salak secara turun-temurun sebagai mata pencaharian utama." Masriani, Anggota Kelompok tani

b. Keberadaan petani milenial

Pengembangan minat generasi muda dalam bidang pertanian saat ini menjadi perhatian strategis dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai respon terhadap penurunan keterlibatan tenaga kerja muda di sektor pertanian nasional. Fenomena ini menunjukkan urgensi regenerasi petani di tengah petani usia lanjut yang masih mendominasi struktur pelaku usaha tani. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan bekerja sama dengan pihak swasta, khususnya PT Martabe Batang Toru, melalui pendekatan kolaboratif membentuk kelompok Petani Milenial yang terwadahi dalam Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S). Langkah ini selaras dengan pengkajian Aziza dkk. (2022) bahwa regenerasi petani harus dilakukan dengan membangun model pelatihan dan pendidikan berbasis teknologi yang mengakomodasi karakteristik generasi milenial.

Kelompok petani milenial yang tergabung dalam P4S tidak hanya menerima pelatihan teknis pertanian secara intensif, tetapi juga telah dibekali dengan pengetahuan kewirausahaan, kemampuan manajerial, serta pemanfaatan teknologi digital dan aplikasi pertanian presisi. Legalitas kelembagaan mereka yang telah berbadan hukum menjadi nilai tambah strategis dalam mengakses dukungan permodalan dan jaringan pasar. Lebih lanjut, keberadaan mereka menjadi aset penting dalam pembentukan model kelembagaan ekonomi petani modern, seperti koperasi berbasis digital dan unit agribisnis yang dikelola secara profesional oleh generasi muda. Hal ini selaras dengan kebutuhan untuk membangun struktur kelembagaan pertanian yang adaptif, dan inovatif dalam era digital.

Dukungan terhadap petani milenial ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Bappeda Tapanuli Selatan, Chairul Rizal Lubis, yang dikutip dari laman Agincourt Resources. Ia menegaskan bahwa “pekerjaan yang akan terus berkembang di masa yang akan datang

adalah petani yang menguasai modernisasi peralatan pertanian. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PAM adalah pekerjaan yang diperkirakan tumbuh dan berkembang ke depannya.” Pernyataan tersebut secara implisit mengafirmasi bahwa pertanian modern yang dikelola oleh generasi muda menjadi pilar penting pembangunan ekonomi desa ke depan.

Hal ini sejalan dengan hasil pengkajian oleh (Effendy dan Lukman 2020) dalam jurnal “Model Pengembangan Kelembagaan Petani Menuju Kelembagaan Ekonomi Petani”, yang menyebutkan bahwa kelompok tani, khususnya yang sudah berbadan hukum dan memiliki akses pelatihan serta jejaring kelembagaan, memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kelembagaan ekonomi petani berbasis korporasi. Peran petani muda yang aktif dan siap teknologi menjadi faktor penting dalam mempercepat proses transformasi tersebut (Effendy dan Lukman 2020).

"Saat ini, Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan telah mulai membina kelompok petani milenial. Kelompok ini terdiri dari 30 orang anggota yang telah mendapatkan pelatihan hasil kerja sama antara Dinas Pertanian dengan PT Martabe Batang Toru. Salah satu keunggulan kelompok petani milenial ini adalah kesiapan mereka untuk diterjunkan sebagai tenaga penyuluh di berbagai kecamatan. Apabila dibutuhkan, mereka telah disiapkan dan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas penyuluhan tersebut.." Rahayu Ningsih, Dinas Pertanian Tapsel.

" Untuk anak muda, telah ada kerja sama antara P4S dan PT Martabe untuk membantu petani dalam bidang pertanian, mulai dari budidaya, pemupukan, pengolahan hasil, hingga pemasaran.." Wardah Murti, Anggota P4S.

c. Motivasi Petani Dalam Pembentukan KEP

Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan para ketua kelompok tani dari berbagai desa di Kecamatan Angkola Barat, terlihat dengan jelas adanya semangat dan antusias tinggi terhadap pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Para peserta menyuarakan kebutuhan mendesak akan adanya lembaga bersama yang mampu mewadahi aspirasi dan kebutuhan ekonomi petani secara lebih terorganisir dan terarah. Mereka memandang bahwa keberadaan kelembagaan ekonomi yang kuat tidak hanya menjadi sarana administratif untuk mengakses bantuan pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menghadapi berbagai tantangan struktural di sektor pertanian.

Secara umum, kelompok tani menyadari bahwa tantangan pertanian di era modern tidak cukup diselesaikan secara individual. Mereka menyebutkan bahwa sistem usaha tani kini memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi mulai dari pengadaan sarana produksi, pengelolaan pascapanen, hingga pemasaran produk. Dalam konteks ini, kelembagaan tani dipandang mampu menjadi penggerak dalam memperkuat posisi tawar petani terhadap pasar dan tengkulak, serta membuka akses terhadap sumber daya penting seperti permodalan, teknologi, pelatihan, dan informasi.

Sejumlah peserta FGD juga menyampaikan bahwa salah satu kendala utama yang mereka hadapi adalah sistem pertanian lokal di mana kelompok tani bergerak sendiri-sendiri, tanpa adanya koordinasi atau sinergi antarkelompok. Hal ini menyebabkan rendahnya daya tawar dan tingginya biaya transaksi. Oleh karena itu, melalui pembentukan kelembagaan seperti Gapoktan atau koperasi tani, diharapkan akan terbentuk sistem kerja sama yang mampu menyederhanakan alur distribusi, memperkuat jejaring pasar, dan menciptakan ekonomi yang lebih efisien.

Lebih lanjut, kelembagaan tani yang berfungsi optimal juga dianggap mampu menjadi wadah edukasi dan pemberdayaan petani, khususnya dalam aspek literasi digital, manajemen usaha, dan penggunaan teknologi pertanian modern. Keberadaan kelembagaan

formal dapat menjadi fasilitator pelatihan dan inovasi bagi petani terutama generasi muda sehingga sektor pertanian tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara adaptif terhadap dinamika zaman. Hal ini penting mengingat tantangan pertanian ke depan berkaitan erat dengan perubahan iklim, fluktuasi harga, dan ketatnya persaingan pasar.

Pandangan para petani ini selaras dengan hasil pengkajian (Rustam et.,al 2021) “Studi Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Bogor Berbasis Produk Unggulan Daerah dengan Analisis SWOT” yang menegaskan bahwa penguatan kelembagaan lokal berbasis komoditas unggulan daerah berperan penting dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, mendorong nilai tambah, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks tersebut, kelembagaan bukan hanya alat teknis, tetapi juga menjadi platform sosial-ekonomi yang mendorong terwujudnya agribisnis lokal yang berkelanjutan.

Selain itu, (Rustam et.,al 2021) juga menekankan bahwa keberhasilan kelembagaan sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif warga dalam seluruh proses pembangunan kelembagaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Strategi pembangunan berbasis partisipasi tersebut terbukti mampu menciptakan rasa memiliki (sense of ownership) yang tinggi, memperkuat sosial antaranggota, serta meningkatkan efektivitas program karena dirancang berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal.

" Sangat diperlukan, karena dengan adanya kelembagaan ekonomi tani, petani dapat lebih mudah mengakses bantuan modal, pupuk bersubsidi, dan pemasaran hasil panen.. " Abdul Gani, Ketua Poktan.

Analisis Kelemahan (Weaknesses) Dalam Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani

Meski memiliki banyak kekuatan, kelompok tani di Angkola Barat juga menghadapi sejumlah kelemahan yang menjadi hambatan utama dalam pembentukan kelembagaan ekonomi, di antaranya:

a. Rendahnya penerimaan teknologi dan inovasi

Praktik pertanian tradisional masih mendominasi aktivitas budidaya yang dilakukan oleh sebagian besar petani, terutama karena metode ini diwariskan secara turun-temurun dan dianggap lebih aman serta telah teruji dalam jangka waktu yang lama. Meskipun demikian, pendekatan tradisional ini sering kali tidak mampu menghasilkan produktivitas setinggi sistem pertanian modern yang berbasis inovasi dan teknologi. Berbagai teknologi seperti penggunaan pupuk organik cair, benih unggul, alat mekanisasi pertanian, serta teknik irigasi yang efisien sebenarnya telah diperkenalkan oleh penyuluh maupun mitra pertanian. Namun, adopsi terhadap teknologi tersebut masih rendah karena banyak petani hanya berada pada tahap mengenal dan tertarik, belum sampai menerapkannya secara konsisten dalam praktik budidaya mereka.

Situasi ini selaras dengan hasil pengkajian Arisa (2022) di Desa Kayu Loe, Kabupaten Bantaeng, yang mengungkapkan bahwa sebagian besar petani masih berada pada tahap awal dalam proses adopsi inovasi, yaitu tahap kesadaran dan minat, namun belum sampai ke tahap implementasi. Fenomena serupa juga terjadi di Kecamatan Angkola Barat, di mana sebagian besar petani tetap menggunakan cara bertani tradisional yang dianggap lebih cocok dan aman berdasarkan pengalaman pribadi dan kearifan lokal, dibandingkan mengikuti saran teknis dari penyuluh pertanian.

Di lapangan, banyak petani masih enggan mencoba inovasi baru karena keterbatasan informasi, biaya awal, dan kekhawatiran akan kegagalan. Beberapa petani yang pernah mencoba inovasi baru pun seringkali kembali ke cara lama karena kurangnya pendampingan lanjutan, tidak ada forum belajar bersama, atau ketidaksesuaian inovasi dengan kondisi lokal.

Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya produktivitas dan daya saing komoditas utama yaitu salak serta turut memperlemah kemampuan petani dalam membentuk kelembagaan ekonomi seperti koperasi tani atau unit usaha bersama. Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian di Angkola Barat perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas petani, tidak hanya dari sisi pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dalam membangun sikap terbuka terhadap inovasi. Penguatan kelembagaan lokal juga menjadi kunci penting, agar lembaga-lembaga ini dapat menjadi jembatan yang menghubungkan petani dengan akses pasar dan teknologi.

Pengkajian yang dilakukan oleh (Saridewi.,et.al 2020) juga menegaskan pentingnya peran penyuluh dalam proses adopsi teknologi. Dalam studinya tentang peningkatan produksi padi di Kabupaten Tasikmalaya, mereka menemukan bahwa sebagian besar petani hanya sampai pada tahap menilai atau mencoba teknologi baru, namun gagal melanjutkan ke tahap penerapan secara penuh. Kegagalan ini umumnya disebabkan oleh minimnya pendampingan teknis, kurangnya informasi lanjutan, serta kuatnya ikatan pada cara bertani tradisional yang telah tertanam secara turun-temurun. Hal yang sama juga terjadi di Angkola Barat, di mana penyuluh pertanian belum mampu secara maksimal menjangkau seluruh petani secara intensif, dan masih banyak petani yang belum mendapatkan pelatihan praktis secara berkala. Hal ini didukung oleh pernyataan petani yang melaksanakan FGD, yaitu:

"Sebagian petani di sini enggan mencoba cara baru. Misalnya saat diajak menggunakan pupuk organik atau varietas unggul, mereka khawatir gagal, sehingga tetap memilih menggunakan cara-cara lama." Nelly Simanjuntak, anggota kelompok tani.

"Beberapa petani masih kurang memiliki motivasi untuk berkembang dan cenderung sulit diajak berpikir maju. ketika diajak untuk berkumpul dan berdiskusi bersama petani lain, tidak ada yang bersedia hadir" Ali Mastua Siregar, Ketua Kelompok Tani.

"Masih sangat tertinggal, karena petani salak di sini belum mampu mempelajari teknologi pertanian yang lebih maju. Dulu, saya pernah menerima tamu dari Thailand yang datang khusus ke Indonesia untuk belajar tentang salak. Di Thailand sendiri salak belum ada, namun mereka sudah mulai mempelajari budidayeranya. Jika tidak ada dukungan untuk

pengembangan petani salak di sini, bukan tidak mungkin kita akan tertinggal oleh mereka yang justru belajar dari kita " Dian Rizky Batubara, Duta Petani Milenial.

b. Minimnya Manajemen Kelembagaan.

Sebagian besar petani masih memandang kelembagaan tani hanya sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, bukan sebagai wadah untuk belajar bersama, mengatur usaha tani, atau memperkuat posisi mereka di pasar. Akibatnya, banyak kelompok tani hanya aktif saat ada bantuan, tapi tidak menjalankan kegiatan penting seperti rapat kelompok, pelatihan, pengelolaan keuangan, atau kerja sama usaha. Hal ini membuat kelompok tani kehilangan fungsinya dan tidak berkembang.

Kondisi ini mirip dengan hasil pengkajian (Basoly dkk. 2023) di Kecamatan Paguyaman, yang menunjukkan bahwa masalah utama kelembagaan petani adalah rendahnya kesadaran bersama, kurangnya partisipasi anggota, dan lemahnya kerja sama dengan pihak luar. Dalam banyak kasus, kelompok tani hanya sekadar formalitas dan tidak benar-benar aktif. Petani lebih mementingkan urusan pribadi, sehingga kegiatan bersama seperti menyusun rencana usaha, mencoba teknologi baru, atau menjalin kerja sama dengan pasar sulit dilakukan secara efektif.

Kondisi seperti ini juga terlihat di beberapa desa di Kecamatan Angkola Barat. Banyak kelompok tani tidak aktif mengadakan pertemuan, pelatihan, atau kegiatan

bersama lainnya. Kelompok hanya berjalan saat ada bantuan, bukan sebagai tempat untuk meningkatkan produksi, memperluas jaringan distribusi, atau mengatur pemasaran secara bersama. Tanpa pemahaman dan komitmen dari anggotanya, kelembagaan petani hanya akan menjadi bentuk organisasi tanpa fungsi yang jelas.

Oleh karena itu, perlu ada perubahan cara pandang terhadap kelembagaan. Tidak cukup hanya mengurus administrasi, tetapi juga harus membangun kesadaran untuk aktif bersama, memperkuat kemampuan pengurus dalam mengelola kelompok, dan menjalin kerja sama dengan pihak luar seperti koperasi, lembaga keuangan, dan perusahaan. Hal ini juga sejalan dengan pengkajian yang dilakukan oleh (Rahma et.,al.

2020) dalam jurnal “Hubungan Persepsi Petani terhadap Pembentukan Kelompok Tani dengan Minat Berkelompok”, yang menemukan bahwa sebagian besar petani hanya memahami kelompok tani sebagai sarana untuk memperoleh bantuan atau dukungan pemerintah. Pemahaman terhadap fungsi kelembagaan tani secara lebih luas, seperti sebagai wadah pemberdayaan dan pengembangan usaha, masih tergolong rendah. Persepsi seperti ini berpengaruh signifikan terhadap minat berkelompok dan tingkat partisipasi petani dalam kegiatan kelembagaan (Rahma et al., 2020)

" Banyak petani yang masih menganggap kelompok tani hanya sebagai tempat untuk mendapatkan bantuan. Kegiatan kelompok pun cenderung tidak berjalan jika tidak ada program dari pemerintah.." Khoirun Saleh Siagian. Ketua Kelompok tani.

" Sebagian petani masih kurang memiliki semangat untuk berkembang dan sulit diajak berpikir lebih maju. Saat diajak untuk berkumpul dan berdiskusi bersama petani lainnya, sering kali tidak ada yang bersedia hadir." Ali Mastua Siregar, Ketua Kelompok Tani.

c. Akses Informasi

Salah satu masalah utama yang masih dihadapi petani di Kecamatan Angkola Barat adalah sulitnya mendapatkan informasi pertanian yang cepat, tepat, dan mudah dimengerti. Sebagian besar petani belum terbiasa menggunakan teknologi seperti internet, aplikasi pertanian, atau media sosial untuk belajar, karena masih rendahnya pemahaman terhadap teknologi dan kurangnya bimbingan. Selama ini, petani lebih banyak mengandalkan informasi dari mulut ke mulut atau dari penyuluh yang datang tidak menentu, sehingga pengetahuan yang mereka dapat tidak merata dan sering tertinggal.

Informasi penting seperti harga pasar, jadwal distribusi pupuk subsidi, peluang pelatihan, dan program bantuan pemerintah sering tidak sampai ke semua anggota kelompok tani. Akibatnya, petani lambat dalam menggunakan inovasi, usahanya jadi kurang efisien, dan mereka kesulitan membuat keputusan yang berdasarkan data.

Pengkajian oleh (Sirajuddin & Kamba, 2021) menjelaskan bahwa rendahnya pendidikan, kurangnya wawasan luar, dan jaranganya berkomunikasi dengan sumber informasi menjadi penyebab utama petani sulit mendapatkan dan menggunakan informasi pertanian. Pengkajian itu juga menunjukkan bahwa meskipun petani berada di usia produktif dan punya pengalaman bertani, hal itu belum cukup kalau tidak dibarengi dengan kemampuan menggunakan teknologi dan akses ke media komunikasi modern.

Dalam kelembagaan ekonomi petani, kurangnya akses informasi menjadi hambatan besar untuk membangun organisasi yang berbasis data, mampu mengikuti perkembangan pasar, dan tanggap terhadap teknologi. Jika tidak ada sistem informasi pertanian yang mudah diakses dan digunakan oleh petani, serta tidak didukung pelatihan digital yang berkelanjutan, maka petani di tingkat bawah akan terus tertinggal menghadapi tantangan global dan perkembangan pertanian modern (era pertanian 4.0).

Hal ini juga sejalan dengan pengkajian yang dilakukan oleh (Anangsfd17 & Iskarni, 2023) dalam jurnal “Tingkat Kesiapan Petani Kelapa Sawit Mandiri dalam Menghadapi

Peremajaan Kebun (Replanting) di Nagari Taratak Tinggi”, yang menyebutkan bahwa tingkat pengetahuan petani terhadap budidaya dan teknis peremajaan masih tergolong rendah. Bahkan dalam aspek kesiapan menyeluruh, tidak ada satu pun petani yang benar-benar siap untuk menghadapi proses modernisasi kebun. Kurangnya keterampilan teknis, minimnya pemberdayaan, dan terbatasnya kesiapan biaya menjadi faktor dominan ketidaksiapan tersebut (Safadri dan Iskarni 2023).

" Untuk akses internet, kami hanya terbiasa menggunakan WhatsApp atau Facebook. Informasi lainnya biasanya kami peroleh dari penyuluh pertanian.." Linda Sari Ritonga.

"Masih sangat tertinggal, karena petani salak di sini belum mampu mempelajari teknologi pertanian yang lebih maju. Dahulu, saya pernah menerima klien dari Thailand yang datang khusus ke Indonesia untuk belajar tentang salak. Namun, saat itu para petani kita belum siap. Dari segi standar pabrik dan pengolahan, sebenarnya sudah memadai, tetapi kesiapan petaninya sendiri yang masih belum mendukung.." Dian Rizky Batubara, Duta Petani Milenial dan Anggota P4S PT. Martabe.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil Pengkajian dan Pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Analisis SWOT yang di peroleh yaitu Strengths (komoditas unggulan lokal, adanya petani milenial, motivasi petani untuk Membentuk KEP), weakness (rendahnya), serta ancaman (fluktuasi harga, perubahan iklim, dan kurangnya minat generasi muda terhadap pertanian). Opportunities (program KUR, kemitraan dengan P4S dan PT Martabe), Threats (Fluktuasi harga salak, Menurunnya minat konsumen salak.)
2. Strategi pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) di Kecamatan Angkola Barat disusun berdasarkan analisis SWOT dengan pendekatan empat arah. Strategi Strength–Opportunities (S–O) Melakukan pendampingan dari pemerintah (Penyuluh dan dinas pertanian) terhadap petani millenial, petani, dan P4S, Mengembangkan Penjualan produk unggulan Lokal dengan memanfaatkan mitra, Melakukan Pelatihan Olahan Salak bagi petani yang memiliki komitmen. Strategi Weakness–Opportunities (W–O) Peningkatan Adopsi Teknologi dan inovasi melalui Program Pelatihan dan Pendampingan, Membangun Pojok Informasi Tani di desa melalui sinergi dengan P4S dan penyuluh, Pelatihan Manajemen Kelembagaan Berbasis Produksi Olahan.. Strategi Strength–Threats (S–T) Pembentukan KEP (Gapoktan) untuk menghadapi fluktuasi harga, Mengoptimalkan Peran Petani Milenial dalam Inovasi dan Promosi Digital Produk Salak, Pengembangan Diversifikasi Produk Olahan Salak untuk Meredam Fluktuasi Harga. Sementara itu, strategi Weakness–Threats (W–T) membuat tim pemasaran internal yang fokus pada promosi lokal dan media sosial, membuat demplot edukatif berbasis teknologi murah di lahan kelompok tani, melakukan survei sederhana tentang minat konsumen lokal terhadap produk salak
3. Tingkat partisipasi petani dalam proses pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) di Kecamatan Angkola Barat dari empat aspek keterlibatan utama yang diukur, yaitu kehadiran sebanyak 71,4% responden masuk dalam kategori kehadiran tinggi. Dalam hal keaktifan memberikan masukan, 57,1% responden

berada pada kategori tinggi, Keterlibatan dalam menyusun perencanaan kelembagaan juga menunjukkan hasil yang positif, di mana 57,1% responden terlibat secara aktif (kategori tinggi), Sementara itu, dalam aspek menyetujui draft rencana, keterlibatan petani sangat menonjol, dengan seluruh responden (100%) menunjukkan partisipasi dalam

kategori tinggi.

Saran

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlu terus dilakukan melalui pelatihan rutin mengenai manajemen usaha tani, administrasi kelompok, dan literasi kelembagaan. Hal ini bertujuan agar kelompok tani dapat berkembang menjadi kelembagaan ekonomi petani yang mandiri dan profesional.
2. Optimalisasi partisipasi petani meskipun sudah tinggi, tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya melalui penyuluhan yang bersifat aplikatif, melibatkan petani dalam proses pengambilan keputusan, serta menyediakan ruang dialog terbuka antaranggota kelompok.
3. Fasilitasi legalitas kelembagaan oleh pemerintah daerah dan instansi teknis sangat penting agar kelompok tani dapat mengakses program bantuan, pembiayaan, dan kemitraan usaha secara lebih luas.
4. Sinergi dengan pihak swasta dan lembaga keuangan perlu diperkuat untuk memperluas jaringan usaha tani dan membuka akses pasar. Program pendampingan berkelanjutan bersama pelaku usaha dan stakeholder agribisnis akan mempercepat pertumbuhan kelembagaan petani.
5. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan strategi kelembagaan ekonomi tani diperlukan guna memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan mampu mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan petani.

DAFTAR PUSAKA

- Abdullah, A. A., D. Rahmawati., M. A. Panigoro., R. R. Syukur., & J. Khali. 2021. Peran Penyuluh Pertanian Terhadap Meningkatkan Partisipasi Petani Di Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo. *Agrinesia: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 5 (2): 148-154
- Ali D. W., Halid, A., & Boekoesoe, Y. (2024). Strategi Pengembangan Kelembagaan Kelompok Tani Pada Usahatani Jagung Hibrida di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. *AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 263–272
- Anang S., & Iskarni, P. (2023). TINGKAT KESIAPAN PETANI KELAPA SAWIT MANDIRI DALAM MENGHADAPI PEREMAJAAN KEBUN (REPLANTING) DI NAGARI TARATAK INGGI KECAMATAN TIMPEH. *JURNAL BUANA*, 7(1), 10–21.
- Anuraga G., Indrasetianingsih A., A. M. (2021). Pelatihan Pengujian Hipotesis Statistika Dasar Dengan Software R. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 4(2), 307–316.
- Ardiansyah, Muhammad. 2020. Analisis Strategi Dalam Meningkatkan Keunggulan Bersaing Dengan Menggunakan Swot Analisis Dan Model Bisnis Canva (Studi Kasus Pada Pt. Bumi Sarana Utama). Tesis. Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.
- Arieyanti Dwi Astuti, & Jatmiko Wahyudi. (2023). Strategi Pengelolaan Kelembagaan Kelompok Tani Kelas Utama Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Dan Pendidikan Vokasi Pertanian*, 4(1), 217–238.
- Arisa. (2022). Analisis Adopsi Inovasi Petani dalam Pengembangan Usahatani Bawang Merah di Desa Kayu Loe Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Aziza, T. N., Surito, & Darmi. (2022). Petani Milenial: Regenerasi Petani di Sektor Pertanian. *Forum Pengkajian Agro Ekonomi*, 40(1), 1–11
- Basoly, R. A. I., Rauf, A., & Indriani, R. (2023). Manajemen Kelembagaan Usahatani Bawang Merah di Kecamatan Paguyaman. *AGRINESIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 7(2), 121–129
- Bisjoe Arh. 2018. Menjaring Data Dan Informasi Pengkajian Melalui Fgd (Focus Group Discussion): Belajar Dari Praktek Lapangan. *Info Teknis Eboni*. 15 : 17– 27.
- Data Dinas Perdagangan Dan Koperasi Ukm Kabupaten Tapanuli Selatan, 2023. Data Statistik Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Petani, 2023
- David, Fred R. *Strategic Management: Concepts And Cases*. 11th Ed. Upper Saddle River:

- Pearson Prentice Hall, 2006. Dalam Bagio, A. Analisis Matriks Swot Dalam Pengembangan Strategi Bisnis. Jurnal Manajemen, 2021.
- Dzulkarnain, Imam Santoso, And Siti Asmaul Mustaniroh. 2020. "Strategi Pengembangan Kemitraan Agroindustri Nilam Di Kabupaten Konawe Selatan Menggunakan Metode Analisis Swot Dan Ahp." Jurnal Teknologi Industri Pertanian, April, 53–62.
- Effendy, Lukman. 2020. "Model Pengembangan Kelembagaan Petani Menuju Kelembagaan Ekonomi Petani Di Kecamatan Sindangkasih Ciamis." Jurnal Ekonomi Pembangunan Stie Muhammadiyah Palopo.
- Elizabeth, R., Inez, G., & Ivan, G. S. (2021). Akselerasi Pengembangan Agribisnis, Implementasi Kelembagaan Kemitraan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani Hortikultura. *Mimbar Agribisnis*, 7(2), 1726–1739
- Ermawati, Y. M.(2022). Analisis Swot Strategi Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Produk Suli5 Pt.Umsurya Bina Bangsa. *Jurnal Manajemen Dan Pengkajian Akuntansi (Jumpa)*, 14(8.5.2017), 2003–2005.
- Feriawan Agung Mahendra, Agung Wibowo, R. S. (2024). Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Jejaring Pemasaran Petani Kentang (*Solanum Tuberosum*) di Kecamatan Ngablak. *Urnal.Fkip.Uns.Ac.Id/Index.Php/Imscs*, 2(1).
- Gaddi, A. (2021). Strategi Pengembangan Agribisnis Kopi Arabika Didesa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
- Hidayat, N. (2023). Analisis Pola Kemitraan Dalam Meningkatkan Produktivitas Petani Kabupaten Jember Pada PT East West Seed Indonesia (EWINDO). Skripsi. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- Iba Z. Dan Wardhana A. (2023). Metode Pengkajian Metode Pengkajian. In *Metode Pengkajian Kualitatif* (Vol. 3, Issue 17).
- Irwanto. Focus Group Discussion (Fgd): Proses Pengumpulan Data Dan Informasi Melalui Diskusi Kelompok. Jakarta: Penerbit Ilmu Sosial, 2006.
- Isdialah. 2023. "Respon Petani Lorong Pelaksana Urban Farming Terhadap Pengembangan Agribisnis Cabai Di Kota Makassar." *Cemerlang : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 3 (4): 372–79.
- Ismail Sholihin (2012). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Erlangga
- Journal Of Business Management*, 2022.
- Kurniawan, Dediek Tri, Inanda Shinta Anugrahani, Arum Prasasti, And Raisa Fitri. 2020. "Pelatihan Dan Pendampingan Umkm Di Desa Gajahrejo Dalam Pembuatan Desain Kemasan Inovatif Oleh-Oleh Khas Malang Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk." *Vivabio: Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 3 (1): 22.
- LUBIS, I. Y. (1967). Metode Marketing Mix Dan Analisa Swot Dalam Strategi Bersaing Pada Koperasi Pengolahan Salak Agrina Di Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2016, 1–2.
- Mardiyanto, T. C., Endrasari, R., & Murtiati, S. (2024). Strategi Penguatan Kelembagaan Petani sebagai Produsen Benih Padi di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 31(2), 116–126.
- Mashur. 2021. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Penyuluhan*. Cv. Global Aksara Pres.
- Maulida Surayya, Edhi Martono, & Subejo Subejo. (2024). Analisis Jalur (Path Analysis) untuk Mengetahui Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal yang Memengaruhi Kepuasan Petani dalam Melaksanakan Program Kartu Tani. *JURNAL TRITON*, 15(2), 300–309.
- Mus, A., Et Al. *The Role Of Swot Analysis In Business Strategy Development*.
- Mustanir, A. 2020. *Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Wanita Tani*. Cv.Penerbit Qiara Media. Pasuruan
- Nalle, M. N., Maulana, A. S., Matoneng, O. W., Nalle, C. Y. A., & Indrasti, R. (2022). Pelatihan kewirausahaan berbasis pangan lokal di kelurahan benpasi kecamatan kota kefamenanu kabupaten ttu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*.
- Nilasari, F., & Novitaningtyas, I. (2020). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Gabungan Kelompok Tani Di Kabupaten Magelang. *Jurnal Agribisnis*, 22(2), 178–190.

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Dan Gabungan Kelompok Tani
- Rahma, Dede Aulia, Suyudi Suyudi, And Hendar Nuryaman. 2020. "Hubungan Persepsi Petani Terhadap Pembentukan Kelompok Tani Dengan Minat Berkelompok." *Jurnal Agristan* 2 (2).
- Ramli, Yanto And Kartini, Dwi. (2022). *Manajemen Strategik Dan Bisnis*. Bumi Aksara. Jakarta. Indonesia.
- Ristanti, R., Anwar, C., Arifuddin, M. R., Nuraini, K., & Niharo, N. S. (2025). Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Kemandirian dan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal. *Nusantara Community Empowerment Review*, 3(1), 77–82.
- Romadhona, Harri, And Zulfairah. 2025. "Dampak Kebijakan Pemerintah Dan Akses Petani Ke Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Perkebunan Kelapa Sawit." *Jurnal Greenation Pertanian Dan Perkebunan* 1 (2): 56–64.
- Rustam, Kuswadi, And Rachmat Subarkah. 2021. "Studi Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Bogor Berbasis Produk Unggulan Daerah Dengan Analisis Swot." *Kajian Ekonomi Dan Bisnis* 16 (2).
- Saridewi, Tri Ratna, And Amelia Nani Siregar. 2020. "Hubungan Antara Peran Penyuluh Dan Adopsi Teknologi Oleh Petani Terhadap Peningkatan Produksi Padi Di Kabupaten Tasikmalaya." *Jurnal Penyuluhan Pertanian* 5 (1): 55–61.
- Sirajuddin, Z., & Liskawati Kamba, P. (2021). Persepsi Petani terhadap Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyuluhan Pertanian. *Jurnal Penyuluhan*, 17(2), 136–144.
- Sugiono. (2023) *Metode Pengkajian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Sutopo (Ed.)).
- Sugiyono. (2019). *Metode Pengkajian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Suma, N. N., & Chodijah, S. N. (2023). Strategi Gabungan Kelompok Tani Dalam Memberdayakan Petani Di Sekitar Area Pertambangan Batu Bara. *Al-I'timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(1), 1–18.
- Surabaya
- Sutisna, Tatang, Aulia Ikhsan, Siti Widiati, Ari Tresna Sumantri, And Gugun Gunawan. 2023. "Potensi Fluktuasi Harga Komoditas Pertanian Dan Dampaknya Di Provinsi Banten." *Jurnal Agribisnis Terpadu* 16 (2): 76.
- Tjahjono, Heru dkk. (2014). "Public Participation towards the Formulation of Environment friendly City Policy in Tulungagung" *International Journal of Applied Sociology*. Vol.4.
- Udayana, I Gusti Bagus, Luluk Sulistiyo Budi, And Ma'ruf Pambudi Nurwantara. 2021. "Strategi Produk Olahan Buah Anggur Sebagai Produk Unggulan Di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali." *Jurnal Teknologi Industri Pertanian* 31 (3): 296–304.
- Wardhana. (2024). *Strategi Dan Kebijakan Bisnis Di Era Digital*. Universitas Telkom, July.
- Wijaya, R. S., Wiyatiningsih, S., Harijani, W. S., & Sentoso, W. (2020). Strategi Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pertanian Jeruk Pamelos Di Desa Tambakmas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. *Berkala Ilmiah AGRIDEVINA*, 8(2), 159–171.
- Wijiharjono N. (2021). *Manajemen Strategik: Pemikiran Michael Porter Dan Implikasinya Bagi Pengembangan Ekonomi Kreatif*. Pt. Gramedia, Jakarta, 4(2), 1–28.
- Yamani, A. (2022). Analisis Model Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Desa Jinoyo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. *Agriekstensi* (Malang).
- Yuniar Hajar Prasekti, M. D. L. iChusnatul U. S. (2025). Peran kelembagaan petani dalam peningkatan daya saing agribisnis kopi di daerah pegunungan kecamatan sendang kabupaten tulungagung. 11(1), 30–41.
- Zamzami, Dan Sahana, W. (2021). Strategi Komunikasi Organisasi. *Journal Educational Research And Social Studies*, Volume 2 N, 25–37.